FUNGSI JAKSA DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)

Anak Agung Alit Krisnha Prananda, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: krisnaprananda22@gmail.com

A.A. Istri Eka Krisna Yanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
gungistri_krisnayanti@unud.ac.id

DOI: KW.2025.v14.i10.p4

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis fungsi jaksa dalam menangani tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan serta studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaksa memiliki peran sentral dalam proses penuntutan, mulai dari tahap prapenuntutan, penuntutan di persidangan, hingga pengawasan atas penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum lainnya. Jaksa juga berfungsi untuk menjamin bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan asas keadilan dan prosedur yang diatur oleh KUHAP. Secara keseluruhan, jaksa berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan hak-hak terdakwa dalam proses peradilan pidana. Jaksa juga berfungsi untuk menjamin bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan asas keadilan dan prosedur yang diatur oleh KUHAP. Selain itu, jaksa memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak-hak terdakwa terlindungi selama proses persidangan. Secara keseluruhan, jaksa berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan hak-hak terdakwa dalam proses peradilan pidana.

Kata Kunci: Jaksa, Tindak Pidana, Peradilan Pidana

ABSTRACT

The aim of this study is to analyze the role of prosecutors in handling criminal offenses based on the Indonesian Code of Criminal Procedure (KUHAP). The method employed is a normative juridical approach, focusing on analyzing relevant laws and literature regarding the function of prosecutors within the criminal justice system. The findings indicate that prosecutors play a central role in the prosecution process, from pre-prosecution, courtroom prosecution, to overseeing investigations conducted by other law enforcement agencies. Prosecutors also ensure that legal processes are carried out in accordance with principles of justice and procedures mandated by KUHAP. Overall, prosecutors are crucial in balancing state interests and the rights of defendants in the criminal justice process. Prosecutors also ensure that legal processes are carried out in accordance with principles of justice and procedures mandated by KUHAP. Additionally, prosecutors are responsible for safeguarding. Overall, prosecutors are crucial in balancing state interests and the rights of defendants in the criminal justice process.

Key Words: Prosecutor, Criminal Offenses, Criminal Justice

I. Pendahuluan

I.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan hukum di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pemahaman yang mendalam mengenai fungsi dan peran jaksa dalam sistem peradilan pidana. Jaksa, sebagai penuntut umum, memegang peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum dan keadilan di masyarakat. Melalui fungsinya, jaksa bertanggung jawab guna menetapkan bahwasannya setiap pelanggaran hukum diproses secara adil serta sejalan pada ketentuan yang berlaku. Dalam konteks ini, KUHAP menjadi acuan utama yang mengatur tata cara dan prosedur dalam penanganan perkara pidana, termasuk peran jaksa dalam setiap tahapan proses hukum.

Fungsi jaksa tidak hanya terbatas pada penuntutan di pengadilan, namun mencakup berbagai aspek lain dalam proses peradilan pidana, seperti penyelidikan dan penyidikan. Sebagai wakil negara, jaksa memiliki kewajiban untuk bertindak sebagai penegak hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum. KUHAP memberikan landasan hukum yang jelas mengenai tugas dan tanggung jawab jaksa, termasuk kewenangan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara, memanggil saksi, serta menghadirkan bukti-bukti di persidangan. Dengan demikian, jaksa memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa setiap kasus ditangani secara profesional dan berintegritas.

Selain itu, peran jaksa dalam penanganan tindak pidana juga mencakup aspek perlindungan hak-hak terdakwa. Jaksa harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan penuntutan dan hak-hak hukum terdakwa, sehingga proses peradilan dapat berlangsung dengan fair. Dalam pelaksanaan tugasnya, jaksa juga dituntut untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan, serta menjunjung tinggi etika profesi. Oleh karena itu, pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan bagi jaksa menjadi sangat penting agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan profesional.

Dengan mempertimbangkan pentingnya fungsi jaksa dalam menangani tindak pidana, penelitian ini mempunyai tujuan guna mengkaji dengan mendalam mengenai peran jaksa berdasarkan ketentuan yang ada dalam KUHAP. Penelitian ini akan membahas berbagai aspek fungsi jaksa, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas, serta cara yang dilaksanakan guna menambah efektivitas penuntutan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Diharapkan, hasil penelitian bisa berkontribusi kepada pengembangan ilmu hukum dan praktik penegakan hukum di tanah air, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran jaksa dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum.¹

Hal tersebut menggarisbawahi pentingnya pelaksanaan hukum acara pidana untuk memastikan masyarakat memahami dan mematuhi hak serta kewajiban mereka, sekaligus mendorong sikap profesional dari penegak hukum agar sesuai dengan fungsi, tugas, keadilan, dan perlindungan harkat martabat manusia. Pasal 1 dari undang-undang ini menjelaskan peran dan wewenang penegak hukum, termasuk penyidik (angka 1), penyidik pembantu (angka 3), penyelidik (angka 4), jaksa (angka 6a), penuntut umum (angka 6b), dan hakim (angka 8). Tindakan yang bersifat pro justitia dijelaskan sebagai tindakan hukum resmi yang dilakukan untuk kepentingan keadilan.²

Fungsi pengawasan yang melekat pada jaksa juga menjadi salah satu aspek penting dalam proses peradilan pidana. Dalam pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh

¹ Sofyan, A. M., et al. (2020). *Hukum acara pidana*. Prenada Media.47.

² *Ibid*, hal.162

polisi, jaksa bertugas memastikan bahwa setiap tindakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, jaksa juga memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah suatu perkara layak dilanjutkan ke tahap penuntutan atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwa jaksa berperan sebagai filter awal dalam proses peradilan, memastikan bahwa hanya kasus yang telah memenuhi syarat dapat dilanjutkan ke persidangan.³

Peran jaksa tidak hanya terbatas pada proses penuntutan, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak terdakwa. KUHAP menegaskan bahwa jaksa harus bertindak secara objektif dan profesional dalam menangani kasus pidana. Selain menuntut terdakwa, jaksa juga harus memastikan bahwa proses peradilan dilakukan dengan memperhatikan hak-hak terdakwa, termasuk hak untuk mendapatkan pembelaan yang adil dan hak atas proses hukum yang sesuai. Dalam hal ini, jaksa berperan sebagai penjaga keseimbangan antara kepentingan negara.

Fenomena penelitian ini berfokus pada dinamika peran jaksa dalam menangani tindak pidana, khususnya terkait dengan pengaruhnya terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana kewenangan dan fungsi jaksa, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas jaksa dalam menjalankan perannya. Melalui pendekatan kualitatif dan analisis mendalam, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh jaksa dalam mewujudkan keadilan yang substantif di masyarakat.

Transformasi ini tidak terlepas dari perubahan paradigma dalam penegakan hukum di Indonesia, di mana prinsip pemisahan fungsi antara aparat penegak hukum, khususnya antara kepolisian dan kejaksaan, menjadi fokus utama. Pemisahan ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih wewenang dan memastikan setiap lembaga dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien. Meskipun demikian, terdapat pengecualian yang memberikan jaksa kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam kasus-kasus tertentu, yang menunjukkan bahwa peran jaksa tetap vital dalam proses penegakan hukum. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis lebih dalam tentang fungsi dan kewenangan jaksa, terutama dalam menghadapi tantangan yang muncul dalam penanganan tindak pidana yang kompleks seperti korupsi. Dengan demikian, karya ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman hukum dan praktik penegakan hukum di Indonesia.

Pembangunan hukum di Indonesia merupakan bagian integral dari upaya menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Salah satu aspek yang krusial dalam sistem peradilan pidana adalah peran jaksa sebagai penuntut umum. Dalam konteks hukum pidana, jaksa memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan melindungi kepentingan masyarakat. Melalui sistem peradilan yang adil dan transparan, jaksa diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang berkeadilan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), fungsi jaksa diatur dengan jelas, yang mencakup peran sebagai penuntut umum dalam proses peradilan. Sebagai penuntut, jaksa bertanggung jawab untuk mengumpulkan bukti, menyusun dakwaan, dan menyampaikan argumen di pengadilan. Peran ini tidak hanya menuntut keahlian dalam hukum, tetapi juga etika dan integritas yang tinggi, mengingat jaksa bertindak atas nama negara dan masyarakat.

Meskipun begitu, tantangan dalam menjalankan fungsi ini cukup besar. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas jaksa dalam menangani tindak pidana,

³ Panjaitan, B. S. (2022). *Hukum acara pidana sudut pandang advokat*. Deepublish.

seperti tekanan politik, korupsi, dan kekurangan sumber daya. Selain itu, perkembangan kejahatan yang semakin kompleks, termasuk kejahatan siber dan terorisme, memerlukan adaptasi dan inovasi dalam penanganannya. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi bagaimana jaksa dapat memenuhi tugas dan tanggung jawabnya dalam menghadapi berbagai tantangan ini.

Dengan memahami fungsi jaksa dalam penanganan tindak pidana berdasarkan KUHAP, kita dapat mengidentifikasi potensi perbaikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hal ini meliputi penguatan kapasitas jaksa, peningkatan sistem pelatihan, serta perlunya kolaborasi dengan lembaga penegak hukum lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam mengenai peran jaksa dan tantangan yang dihadapi, serta menawarkan solusi untuk meningkatkan kinerja jaksa dalam menegakkan hukum di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang, penulis dapat menarik rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana fungsi jaksa dalam menangani tindak pidana dalam proses penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan berdasarkan KUHAP?
2. Apakah jaksa memiliki kewenangan dalam memiliki penyidikan?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini mempunyai tujuan dalam memahami suatu permasalahan hukum, mengetahui pentingnya fungsi jaksa dalam menangani kasus proses pemeriksaan di sidang pengadilan dan peran jaksa dalam menangani tindak pidana berdasarkan dengan KUHAP, serta mengetahui kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan.

II. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ini memanfaatkan pendekatan normatif. Selain itu, pendekatan normatif ini juga akan melibatkan kajian terhadap doktrin hukum dan literatur yang berkaitan dengan penegakan hukum, guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai posisi jaksa sebagai aparat penegak hukum. Dengan demikian, penelitian ini akan memungkinkan penulis untuk mengevaluasi konsistensi dan kesesuaian antara prinsip-prinsip hukum yang ada dengan praktik yang berlangsung di lapangan. Melalui analisis ini, penulis akan dapat menyoroti tantangan yang dihadapi dalam penerapan norma-norma tersebut serta mengidentifikasi area di mana perbaikan atau reformasi mungkin diperlukan dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Pendekatan ini diinginkan bisa memberikan kontribusi dalam pengembangan pemikiran hukum dan praktik penegakan hukum yang lebih efektif serta adil.⁴

⁴ Jonaedi Efendi, S. H. I., & Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Fungsi Jaksa Dalam Menangani Tindak Pidana Dalam Proses Penuntutan Dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Jaksa, sebagai penuntut umum, bertugas untuk mewakili kepentingan negara dalam penegakan hukum, yang mencakup proses penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Tugas ini dimulai sejak tahap penyidikan, di mana jaksa memiliki peran untuk mengawasi proses tersebut agar berjalan sesuai dengan hukum. Dalam konteks ini, jaksa berfungsi sebagai pengawas dan penasihat bagi penyidik, memastikan bahwa semua tindakan yang diambil tidak melanggar hak-hak tersangka dan sesuai dengan prosedur hukum yang ditetapkan oleh KUHAP.

Salah satu aspek krusial dari fungsi jaksa adalah penuntutan di pengadilan. Setelah penyidikan selesai, jaksa menyusun berkas perkara dan memutuskan apakah akan melanjutkan kasus tersebut ke persidangan. Pada tahap ini, jaksa harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap bukti yang ada, serta mempertimbangkan unsur-unsur yang diperlukan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hal ini mengharuskan jaksa untuk tidak hanya fokus pada penuntutan, tetapi juga memastikan bahwa semua bukti yang diajukan adalah sah dan relevan. Dengan demikian, jaksa memainkan peran yang sangat vital dalam menjaga integritas proses peradilan, sekaligus melindungi hak-hak terdakwa untuk mendapatkan peradilan yang adil.

Dalam pelaksanaan tugasnya, jaksa juga dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti tekanan politik, intervensi pihak luar, dan isu-isu terkait korupsi yang dapat mempengaruhi independensi mereka. Oleh karena itu, jaksa perlu mempunyai integritas yang tinggi serta komitmen guna melaksanakan tugasnya dengan profesional. KUHAP memberikan kerangka kerja yang jelas untuk melindungi jaksa dalam melaksanakan fungsi mereka, termasuk ketentuan mengenai perlindungan saksi dan kerahasiaan informasi. Ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegakan hukum dan memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan tanpa adanya pengaruh yang tidak semestinya.

Dalam konteks ini, jaksa bertindak sebagai penghubung antara hasil penyidikan dan proses peradilan, sehingga perannya sangat penting dalam setiap tahap penanganan tindak pidana.⁵ Dalam proses penuntutan, jaksa memiliki tanggung jawab utama untuk menyusun surat dakwaan yang akan diajukan ke pengadilan. Surat dakwaan tersebut harus mengandung informasi yang jelas dan terperinci mengenai tindak pidana yang didakwakan, termasuk waktu, tempat, dan cara kejadiannya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 140 KUHAP. Proses penyusunan surat dakwaan ini tidak bisa dianggap remeh, karena kejelasan dan kekuatan argumen dalam surat dakwaan sangat mempengaruhi jalannya persidangan. Jaksa harus mampu mengidentifikasi fakta-fakta yang relevan dan menyusunnya dalam bentuk dakwaan yang memenuhi syarat hukum agar dapat diterima oleh majelis hakim.⁶

Setelah surat dakwaan disusun, jaksa kemudian melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang, bersama dengan bukti-bukti yang mendukung. Proses ini diatur dalam Pasal 139 KUHAP yang menyebutkan bahwasannya jaksa wajib

⁵ Sihombing, D. C., Syahrin, A., Ablisar, M., & Mulyadi, M. (2023). Penguatan kewenangan jaksa selaku dominus litis sebagai upaya optimalisasi penegakan hukum pidana berorientasi keadilan restoratif. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(2), 70.

⁶ Imso, L. P., & Pratama, E. A. (2019). Pelaksanaan tugas fungsi dan kewenangan kejaksaan Republik Indonesia dalam hubungannya dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 31.

melampirkan semua dokumen dan bukti yang relevan dalam pelimpahan perkara. Di sinilah peran jaksa sebagai pengawas proses hukum dimulai. Mereka harus menetapkan bahwasannya seluruh bukti yang diajukan yakni sah dan diperoleh melalui prosedur yang benar, guna menjaga keadilan bagi terdakwa maupun masyarakat. Keberhasilan dalam tahap ini akan berpengaruh pada kelancaran proses persidangan selanjutnya.

Pada tahap pemeriksaan di pengadilan, jaksa memulai dengan membacakan surat dakwaan di depan majelis hakim dan terdakwa. Ini merupakan langkah awal sebab menandai dimulainya proses persidangan. Dalam Pasal 155 KUHAP, dijelaskan bahwa setelah pembacaan dakwaan, hakim akan menanyakan kepada terdakwa tentang pengakuannya terhadap dakwaan tersebut. Jaksa juga bertugas untuk mempresentasikan bukti-bukti yang ada dan menghadirkan saksi-saksi yang relevan, termasuk saksi ahli jika diperlukan. Proses ini sangat krusial, karena di sini jaksa harus dapat menunjukkan dengan jelas hubungan antara bukti yang diajukan dan tindak pidana yang didakwa.⁷

Selanjutnya, jaksa juga memiliki kewenangan untuk memberikan tanggapan terhadap pledoi atau pembelaan yang diajukan terdakwa serta penasihat hukumnya. Dalam Pasal 183 KUHAP, setelah mendengarkan pledoi, jaksa harus memberikan jawaban dan mempertahankan tuntutanannya. Hal ini memperlihatkan bahwasannya jaksa tidak hanya berperan menjadi penuntut, namun mediator yang menjaga agar proses persidangan tetap berjalan dengan fair. Jaksa harus mampu menanggapi argumen yang diajukan oleh pihak terdakwa dengan baik, serta mempertahankan tuntutan pidana berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan.

Setelah semua proses berlangsung, jaksa kemudian mengajukan tuntutan pidana atau requisitor yang memuat kesimpulan atas dakwaan serta hukuman yang diusulkan. Proses ini diatur dalam Pasal 182 KUHAP dan merupakan langkah akhir dalam penuntutan di sidang pengadilan. Tuntutan ini harus disusun dengan sangat hati-hati, mempertimbangkan semua aspek yang ada, termasuk karakteristik tindak pidana dan keadaan terdakwa. Keberhasilan jaksa dalam menyusun tuntutan pidana yang logis dan berdasar pada bukti yang kuat akan sangat berpengaruh pada keputusan hakim.

Jaksa juga memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum jika putusan hakim tidak sejalan dengan tuntutan yang diajukan. Dalam Pasal 233 dan 244 KUHAP, dijelaskan bahwa jaksa berhak mengajukan banding atau kasasi untuk memastikan bahwa keadilan tetap terwujud. Hal ini menunjukkan bahwa peran jaksa dalam proses hukum tidak berhenti setelah putusan dijatuhkan, tetapi terus berlanjut sampai semua jalur hukum yang ada dieksplorasi. Dengan demikian, jaksa berfungsi sebagai penjaga keadilan, tidak hanya dalam proses penuntutan, tetapi juga dalam memastikan bahwa putusan yang diambil hakim adalah putusan yang tepat dan adil.

Peran Jaksa dalam Proses Penuntutan mencakup beberapa tahapan penting. Pertama, Jaksa bertanggung jawab menyusun surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan. Surat dakwaan harus mencakup rincian lengkap tentang tindak pidana, termasuk waktu, tempat, dan cara kejadiannya, sesuai dengan Pasal 140 KUHAP. Kedua, Jaksa melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang, disertai dengan surat dakwaan dan bukti-bukti yang mendukung, sebagaimana Pasal 139 KUHAP. Selain itu, Jaksa juga memiliki kewenangan untuk menahan tersangka atau terdakwa selama proses penuntutan jika diperlukan untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, sesuai Pasal 21 KUHAP.

⁷ Polontalo, R. S. D. (2018). Independensi jaksa sebagai penuntut umum dalam tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *Lex Crimen*, 7(6), 37.

Dalam tahap pemeriksaan di pengadilan, peran Jaksa dimulai dengan membacakan surat dakwaan di depan majelis hakim dan terdakwa, yang menandai dimulainya sidang, berdasarkan Pasal 155 KUHAP. Kemudian, Jaksa menyajikan bukti-bukti dan menghadirkan saksi-saksi yang relevan untuk mendukung dakwaan, termasuk memeriksa saksi ahli dan saksi fakta sebagaimana diatur dalam Pasal 160-168 KUHAP. Setelah bukti-bukti dan saksi diperiksa, Jaksa mengajukan tuntutan pidana atau requisitor yang memuat kesimpulan atas dakwaan serta hukuman yang diusulkan, sesuai Pasal 182 KUHAP.

Setelah pembelaan (pledoi) dari terdakwa dan penasihat hukumnya, Jaksa memberikan tanggapan atas pledoi tersebut, baik dengan mempertahankan tuntutannya atau menjawab poin-poin yang diajukan dalam pembelaan. Ini diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Jika putusan hakim tidak sejalan dengan tuntutan Jaksa, Jaksa memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum, seperti banding atau kasasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 233 dan 244 KUHAP. Secara keseluruhan, dalam proses penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, Jaksa bertindak sebagai wakil negara dengan tugas memastikan bahwa tindak pidana yang didakwakan bisa terbukti sah serta meyakinkan. Jaksa harus menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, serta menjaga integritas dan profesionalisme dalam penegakan hukum.

3.2. Kewenangan Jaksa dalam melakukan Penyidikan

Dalam proses penuntutan kasus pidana, sehingga memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.⁸ Dalam menjalankan kewenangannya, jaksa berkolaborasi dengan penyidik kepolisian. Meskipun polisi biasanya yang melakukan penyidikan, jaksa memiliki hak untuk ikut serta dalam proses tersebut. Jaksa dapat memberikan arahan dan instruksi kepada penyidik guna menetapkan bahwasannya penyidikan berjalan selaras pada prinsip-prinsip hukum dan prosedur yang berlaku. Hal ini menegaskan posisi jaksa sebagai pengawas dan pengendali proses penyidikan.

Jaksa juga berwenang untuk melakukan penyidikan sendiri dalam kasus-kasus tertentu. Misalnya, dalam perkara tindak pidana tertentu yang kompleks atau berkaitan dengan kepentingan publik, jaksa dapat mengambil inisiatif untuk melakukan penyidikan secara langsung. Kewenangan ini memberikan fleksibilitas bagi jaksa untuk lebih mendalam dalam memahami dan menangani kasus yang memerlukan perhatian khusus. Selain itu, jaksa berwenang untuk memanggil dan memeriksa saksi-saksi, serta meminta keterangan dari ahli yang relevan. Proses pemeriksaan ini penting untuk menggali informasi yang akurat dan relevan dalam rangka menyusun dakwaan. Melalui pemeriksaan saksi, jaksa dapat mengklarifikasi fakta-fakta yang ada dan menentukan apakah terdapat cukup bukti untuk melanjutkan perkara ke tahap penuntutan.⁹

Kewenangan jaksa dalam penyidikan juga mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Jaksa bertanggung jawab guna menetapkan bahwasannya semua tindakan penyidikan dilakukan sejalan pada ketentuan hukum, serta menghormati hak-hak tersangka. Pengawasan ini penting untuk mencegah adanya pelanggaran hak asasi manusia dan penyalahgunaan kekuasaan dalam proses penegakan hukum. Selanjutnya, jaksa dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang dianggap relevan dengan perkara.

⁸ Yuliasuti, E. (2020). Problematika yang dihadapi jaksa dalam penyidikan tindak pidana korupsi (studi kasus pada Kejaksaan Negeri Karanganyar). *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah*, 1(1), 11.

⁹ Koto, I. (2021). Kewenangan jaksa dalam melakukan penggabungan perkara korupsi dan money laundering (studi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(2), 161.

Kewenangan ini dilaksanakan berdasarkan perintah pengadilan, namun dalam situasi tertentu, jaksa dapat melakukan tindakan cepat untuk mencegah hilangnya barang bukti. Tindakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bukti yang diperlukan untuk penuntutan tidak hilang atau dihancurkan.¹⁰

Namun, pelaksanaan kewenangan ini harus selalu mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan profesionalisme. Jaksa sebagai penegak hukum harus mampu menjaga integritas dan kredibilitasnya dalam setiap tindakan yang diambil. Transparansi serta akuntabilitas menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik. Selain itu, penting untuk menggarisbawahi bahwa kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan juga dilengkapi dengan tanggung jawab untuk melindungi hak-hak seluruh pihak yang terlibat, termasuk tersangka dan korban. Jaksa wajib menetapkan bahwasannya proses penyidikan tidak hanya fokus pada pengumpulan bukti, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan restoratif. Hal ini berarti bahwa jaksa perlu mendengarkan suara korban dan memperhatikan dampak dari tindak pidana terhadap mereka. Dengan pendekatan yang inklusif, jaksa dapat memainkan peran penting dalam menciptakan proses peradilan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada penyelesaian yang lebih adil.

Terakhir, implementasi kewenangan jaksa dalam penyidikan tidak terlepas dari tantangan, seperti intervensi politik dan masalah sumber daya. Jaksa harus mampu menghadapi berbagai tekanan yang mungkin mengganggu independensi mereka dalam menjalankan tugas. Oleh karena itu, penting untuk mendukung kebijakan yang memperkuat posisi jaksa sebagai penegak hukum yang mandiri dan profesional. Melalui upaya peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pelatihan, kewenangan jaksa dalam penyidikan dapat dijalankan dengan lebih efektif, sehingga berkontribusi pada terciptanya keadilan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.

Fungsi jaksa dalam menangani tindak pidana sangat penting dan diatur secara jelas dalam KUHP. Sebagai penuntut umum, jaksa memiliki tanggung jawab guna melaksanakan penuntutan terhadap perkara pidana setelah penyidikan selesai. Dalam konteks ini, jaksa bertugas meneliti berkas perkara, mengevaluasi bukti, serta menyusun dakwaan yang jelas dan substansial. Proses ini mencerminkan peran jaksa sebagai pengawal kepentingan publik dan penegak hukum, di mana mereka harus memastikan bahwa setiap tindakan hukum dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan dengan menghormati hak-hak semua pihak.

Kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan diatur dengan jelas pada peraturan perundang-undangan, yang menegaskan bahwa jaksa memiliki tanggung jawab untuk menetapkan bahwasannya proses penyidikan dilaksanakan dengan adil serta sejalan hukum. Salah satu aspek penting dari kewenangan ini yakni kemampuan jaksa untuk terlibat langsung dalam penyidikan, bukan hanya sebagai pengawas. Jaksa dapat memberikan instruksi kepada penyidik, meminta pengumpulan bukti tambahan, dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Hal ini memungkinkan jaksa untuk memastikan bahwa semua bukti yang relevan diperoleh dan dipertimbangkan dalam proses penuntutan, sehingga memperkuat kasus yang akan diajukan di pengadilan.

Lebih lanjut, kewenangan jaksa dalam penyidikan juga mencakup hak untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan berdasarkan perintah pengadilan, serta untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam situasi mendesak. Kewenangan ini sangat penting untuk mengamankan barang bukti yang mungkin hilang atau dihancurkan jika tidak segera diambil. Selain itu, jaksa bertanggung jawab guna menjaga hak-hak

¹⁰ Kurnia, V., Lasmadi, S., & Siregar, E. (2020). Tinjauan yuridis terhadap tugas dan kewenangan jaksa sebagai penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(3), 8.

tersangka selama proses penyidikan, termasuk memastikan bahwa semua tindakan yang diambil tidak melanggar prinsip-prinsip hukum serta HAM. Maka, peran jaksa pada penyidikan bukan hanya sebagai penegak hukum, namun pelindung keadilan yang menetapkan bahwasannya seluruh proses hukum berjalan transparan sert akuntabel.

Selain penuntutan, jaksa juga berperan dalam memberikan bimbingan kepada penyidik selama proses penyidikan. Sesuai dengan ketentuan KUHAP, jaksa memiliki hak untuk mengawasi jalannya penyidikan dan memberikan arahan terkait langkah-langkah yang harus diambil oleh penyidik. Fungsi ini sangat krusial guna menetapkan bahwasannya penyidikan dilaksanakan dengan profesional, efektif, serta sesuai pada hukum yang berlaku. Dengan demikian, jaksa tidak hanya penuntut, namun pengawas yang menjaga integritas proses hukum dari awal hingga akhir.

Di sisi lain, fungsi jaksa juga meliputi peran dalam mediasi dan penyelesaian sengketa, terutama dalam kasus-kasus yang memungkinkan alternatif penyelesaian di luar pengadilan. Jaksa dapat berperan sebagai mediator untuk mencari solusi yang menguntungkan semua pihak, termasuk korban dan pelaku. Pendekatan ini sejalan dengan upaya untuk menciptakan keadilan restoratif, di mana tujuan hukum tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban, serta masyarakat. Dengan demikian, fungsi jaksa dalam menangani tindak pidana menjadi lebih holistik, mencakup penegakan hukum adil serta pencarian keadilan bagi seluruh pihak.

Jaksa memiliki peran sentral sebagai penuntut umum dalam proses peradilan pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 KUHAP, jaksa berfungsi untuk mewakili negara dalam menuntut pelaku tindak pidana di pengadilan. Tugas ini mencakup penyusunan surat dakwaan yang wajib melengkapi syarat formil serta materil, sehingga bisa dipertanggungjawabkan di depan hakim. Jaksa harus memastikan bahwa semua bukti yang relevan diperoleh secara sah dan dihadirkan di persidangan untuk mendukung dakwaannya. Dengan demikian, jaksa berfungsi sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum dan perlindungan kepentingan masyarakat.

Selain sebagai penuntut umum, yakni sebagai penyidik yang mengawasi proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian. Pasal 184 KUHAP menegaskan bahwa jaksa dapat melakukan supervisi terhadap penyidikan guna memastikan bahwa prosedur yang diikuti sejalan pada hukum yang ada. Jaksa memiliki kewenangan guna meminta penyidik melakukan tindakan tertentu, seperti pengumpulan bukti atau pemeriksaan saksi, demi kepentingan penegakan hukum yang adil. Fungsi ini menegaskan pentingnya koordinasi antara jaksa dan penyidik untuk menjamin kualitas penyidikan yang dilakukan.

Jaksa juga memiliki peran dalam menyelesaikan perkara melalui mekanisme diversi dan keadilan restoratif, khususnya untuk tindak pidana yang melibatkan anak-anak atau pelanggaran ringan. Diversi merupakan suatu upaya untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan agar tidak terjadi stigma sosial terhadap pelaku. Dalam konteks ini, jaksa dapat melakukan negosiasi dengan pihak-pihak terkait guna meraih kesepakatan yang menguntungkan seluruh pihak, tanpa melalui proses pengadilan yang panjang. Kegiatan ini sejalan dengan prinsip rehabilitasi dan integrasi sosial bagi pelaku tindak pidana, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri.

Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, jaksa juga bertugas melindungi hak-hak korban tindak pidana. Dalam pelaksanaan tugasnya, jaksa harus memperhatikan aspek pemulihan bagi korban, termasuk memberikan informasi mengenai proses hukum yang sedang berlangsung dan membantu korban untuk

mendapatkan akses ke layanan dukungan psikologis atau hukum. Selain itu, dalam surat dakwaannya, jaksa dapat menuntut restitusi atau ganti rugi bagi korban sebagai bagian dari putusan pengadilan. Dengan melakukan fungsi ini, jaksa tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga berkontribusi pada keadilan sosial dan pemulihan masyarakat yang terdampak oleh tindak pidana.

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia, keberadaan jaksa sebagai penuntut umum serta eksekutor putusan pengadilan memiliki peran yang sangat krusial, terutama dalam menangani kasus korupsi dan kasus-kasus tertentu. Meskipun kewenangan penyidikan secara umum telah dialihkan kepada kepolisian, Pasal 284 ayat (2) KUHP memberikan pengecualian yang memungkinkan jaksa untuk tetap berperan dalam penyidikan tindak pidana khusus. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penegakan hukum yang memungkinkan jaksa untuk mengambil inisiatif dalam kasus yang memerlukan perhatian khusus. Oleh karena itu, penting bagi legislator dan pemangku kebijakan untuk terus mengevaluasi dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan terkait peran jaksa agar tetap relevan dengan dinamika dan kebutuhan penegakan hukum di masyarakat. Selain itu, pelatihan dan penguatan kapasitas jaksa dalam hal penyidikan dan penuntutan juga harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan fungsinya dengan baik, demi terwujudnya keadilan yang efektif dan efisien dalam sistem hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, (2018). *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Depok: Prenada Media.

Panjaitan, B. S., (2022). *Hukum Acara Pidana Sudut Pandang Advokat*. Sleman: Deepublish.

Sofyan, A. M., et. al (2020). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenada Media.

Jurnal

Fauzi, A. (2018). Analisis Yuridis terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) oleh Jaksa dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 3(1), 41

Imso, L. P., & Pratama, E. A. (2019). Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Hubungannya dengan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 31.

Koto, I. (2021). Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penggabungan Perkara Korupsi Dan Money Laundering (Studi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(2), 161.

Kurnia, V., Lasmadi, S., & Siregar, E. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(3), 8.

Polontalo, R. S. D. (2018). Independensi Jaksa Sebagai Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *Lex Crimen*, 7(6)37.

Sihombing, D. C., Syahrin, A., Ablisar, M., & Mulyadi, M. (2023). Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan

Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(2), 70.

Sitinjak, I. Y. (2018). Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Maksitek*, 3(3)101.

Yuliasuti, E. (2020). Problematika Yang Dihadapi Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Karanganyar). *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah*, 1 (1) 11.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 75 Tahun 1959).

Indonesia, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981).

Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2001).

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2004).

Indonesia. Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Keppres No. 86 Tahun 1999.